

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya mengenai analisis laporan realisasi anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab terhadap Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Dilihat dari anggaran dan realisasi belanja maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikatakan baik karena tidak dari tahun 2017–2019 tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 25.223.724.968 atau mencapai 93,81 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 26.886.733.754 Sedangkan realisasi belanja pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 24.638.098.164 atau mencapai 87,72 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 28.086.978.250. Dan pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp 25.351.533.339 atau mencapai 96,82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 26.183.354.519. Dari ketiga tahun tersebut bisa dilihat bahwa persentase realisasi berada dibawah anggaran atau <100% (kecil dari 100%) yang artinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah ekonomis dalam merealisasikan anggaran belanjanya.

3. Pertumbuhan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisis pertumbuhan belanja dari tahun 2017-2019 terus mengalami perubahan (fluktuasi). Dari analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2017/2018 dan tahun anggaran 2018/2019 menunjukkan belanja cukup efisien. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada tahun 2017/2018 adalah sebesar 2,32% dan tahun 2018/2019 sebesar 2,90%.
4. Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja yang digunakan pada tahun 2017–2019, dengan menggunakan analisis varians belanja maka dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kurang efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja, yaitu lebih dari >90%. Jika dilihat dari rasio efisiensi belanja bahwa penggunaan anggaran kurang efisien dikarenakan belum berhasilnya memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.
5. Berdasarkan perhitungan analisis keserasian belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat lebih memprioritaskan anggaran pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, hal ini berarti bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat lebih mengoptimalkan pelaksanaan untuk jalannya pemerintahan dibandingkan dengan pengoptimalan pembangunan daerahnya yang masih minim. Rata – rata belanja operasi tahun 2017 – 2019 adalah 94,43% sedangkan rata – rata belanja modal tahun 2017 – 2019 adalah sebesar 5,91%. Hal ini tidaklah baik, karena pemerintahan seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya atau setidaknya seimbang diantara keduanya yaitu belanja operasi dan belanja modal minimal harus sebanding.

5.2 Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil magang ini adalah pertumbuhan belanja pada periode ini dapat dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran pada periode selanjutnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dapat lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah yaitu APBD dan APBN secara khusus maupun umum. Dengan kinerja yang baik nantinya maka efisiensi, produktifitas, dan efektifitas juga akan semakin baik pastinya.

Dapat lebih mengoptimalkan lagi anggaran belanja modal dan meminimumkan belanja operasi agar semakin baiknya kinerja setidaknya harus sama diantara belanja operasi dengan belanja modal.

